

Pengarang : LAI, ANTON  
Nim : 205060188  
Kota : Jakarta  
Tahun Terbit : 2010  
Deskripsi Fisik : ix, 148 hal. bibli. lamp. 27 cm  
Pembimbing : 1.YUNARI, SRI BAKTI  
Bidang : 1.Hukum  
Subjek : 1.Persaingan usaha tidak sehat  
Abstrak : abstrak (A) Nama: Anton Lai (NIM: 205060188). (B) Judul: Analisis Yuridis Mengenai Dugaan Praktek Diskriminasi dan Persekongkolan Tender dalam Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong (Studi Kasus Putusan No. 13/KPPU-L/2005). (C) Halaman: ix + 148 + lampiran + 2010. (D) Kata kunci: Persaingan Usaha, Praktek Diskriminasi, dan Persekongkolan. (E) Isi: Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu antara lain bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga jika terdapat suatu bentuk persaingan yang dilakukan oleh pengusaha terkait praktek diskriminasi dan persekongkolan tender maka KPPU selaku Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan memeriksa perkara itu. Tidak terkecuali dengan kasus praktek diskriminasi dan persekongkolan tender dalam tender alat kesehatan di rumah sakit Cibinong. Berdasarkan hal ini maka permasalahannya adalah apakah terdapat dugaan praktek diskriminasi dan persekongkolan tender di dalam tender alat kesehatan yang dilakukan panitia tender dengan peserta tender di rumah sakit Cibinong berdasarkan Putusan No.13/KPPU-L/2005 serta sanksi apa yang diberikan oleh KPPU dalam kasus dugaan praktek diskriminasi dan persekongkolan tender alat kesehatan di rumah sakit Cibinong tersebut telah sesuai berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan tipe penelitian normatif dari data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Dalam kasus tender alat kesehatan di rumah sakit Cibinong ternyata terbukti panitia tender telah melakukan praktek diskriminasi dan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Dan sanksi yang diberikan oleh KPPU telah sesuai dengan sanksi terhadap tindakan administratif tapi terdapat sanksi yang melampaui kewenangannya. (D) Acuan: 20 (1990-2009). (E) Pembimbing: Sri Bakti Yunari, S.H., M.H. (F) Penulis: Anton Lai